

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat yang melibatkan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia bersama sektor swasta guna memperluas peluang kerja baru yang bertujuan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad dalam Katiandagho et al., 2022). Sebab itu, maka masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu mengukur potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk pembangunan daerah (Arsyad dalam Marie & Widodo, 2020). Pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata menjadi salah satu pendekatan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Permasalahan utama dalam pembangunan daerah berfokus pada kebijakan yang berbasis pada karakteristik lokal, dengan mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta sumber daya fisik yang dimiliki oleh daerah secara spesifik. Strategi pembangunan ini menekankan pentingnya inisiatif dari suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap strategi pembangunan daerah bertujuan untuk memperluas jumlah dan ragam lapangan kerja bagi masyarakat di suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu bersinergi

dalam merancang pembangunan dengan dukungan sumber daya yang tersedia (Nasution, 2020).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Konsep daerah otonom dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dua komponen penting yang saling berkaitan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 5, istilah "Daerah" atau daerah otonom merujuk pada suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu serta diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan publik secara mandiri, selaras dengan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wilayah otonom tersebut, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dalam perspektif kewenangan yaitu kewenangan suatu daerah yang berfokus pada kemandirian atau kebebasan suatu wilayah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri (Dunggio & Jasin, 2019).

Upaya meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud konkret kemandirian daerah. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan asli lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa jenis penerimaan berikut :

1. Pajak daerah, merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pajak daerah menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah. elalui optimalisasi penerimaan pajak, daerah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri, tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pajak daerah sangat menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pajak daerah dikelola oleh dua tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing memiliki kewenangan dalam mengelola objek pajak tertentu sesuai dengan cakupan administratif dan kapasitas fiskal wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab fiskal yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan pajak daerah juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, pajak daerah

tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Retribusi daerah, merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa yang diberikan atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan individu maupun badan usaha. Retribusi ini dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pemasukan yang diperoleh melalui pengelolaan aset daerah serta dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang mencakup berbagai sumber pendapatan seperti hasil penjualan aset milik daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan dari jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs mata uang asing terhadap rupiah, serta pendapatan berupa komisi, potongan harga, atau bentuk lainnya yang diperoleh dari kegiatan penjualan maupun pelaksanaan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah..

2.1.3 Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwasanya pajak yaitu kewajiban keuangan yang dibebankan kepada masyarakat oleh negara, yang dipungut dengan paksa berdasarkan ketentuan undang-undang,

tanpa memberikan imbalan langsung dan dialokasikan guna pembiayaan negara demi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan definisi tersebut, Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dapat dikenakan secara paksa kepada warga negara berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan Buku Dasar-Dasar Perpajakan Jalil, dkk. (2024) fungsi pajak ada 3, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana dari masyarakat dan dimasukkan ke kas negara untuk keperluan belanja negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat pendorong masyarakat dalam perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi Sosial

Pajak sebagai pengatur masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan perpajakan kepada masyarakat.

Berdasarkan Buku Dasar-Dasar Perpajakan Jalil, dkk. (2024) pajak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni :

1. Berdasarkan Golongan

- Pajak Langsung, adalah jenis pajak yang wajib disetor dan dibayar secara langsung oleh wajib pajak serta tidak dapat dipindahtangankan ataupun dibebankan ke pihak lain.
- Pajak Tidak Langsung, merupakan jenis pajak yang pembayaran dan penyetorannya dapat dialihkan ataupun dibebankan ke pihak lain dalam praktik pelaksanaannya.

2. Berdasarkan Sifat

- Pajak Subjektif, adalah jenis pajak dengan penetapannya didasarkan pada kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak.
- Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dipungut atas dasar objek pajaknya saja, tanpa memperhitungkan kondisi pihak yang dikenai pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Pusat, merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara.
- Pajak Daerah, yaitu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

2.1.4 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan jenis pajak yang dikenakan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Menurut pendapat Pasaribu dan Woyanti (2024), pajak hotel adalah pungutan yang dikenakan terhadap kegiatan usaha perhotelan

dan jenis usaha sejenis lainnya, seperti penginapan wisata, rumah inap, losmen, serta kamar kos yang memiliki lebih dari 10 unit kamar.

Objek pajak hotel mencakup seluruh layanan yang disediakan oleh pihak hotel kepada pelanggannya dan dikenakan biaya, termasuk berbagai fasilitas penunjang yang menjadi bagian dari kelengkapan hotel untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi tamu, seperti fasilitas olahraga maupun hiburan. Sementara itu, subjek pajak hotel adalah individu atau badan yang melakukan transaksi pembayaran atas layanan hotel kepada pihak penyedia jasa. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak hotel adalah individu atau badan yang menyelenggarakan atau memiliki usaha di bidang perhotelan.

Dasar pengenaan pajak hotel yaitu total biaya yang wajib dibayarkan oleh pelanggan kepada pihak hotel. Penetapan tarif pajak hotel dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, namun pada umumnya ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak hotel yang wajib dibayarkan diperoleh dari hasil perkalian antara tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajaknya. Adapun rumus perhitungan pajak hotel terutang adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Terutang} &= \text{Tarif Pajak Hotel} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak Hotel (10\%)} \times \text{Jumlah pembayaran} \\ &\quad \text{yang harus dibayar pada hotel} \end{aligned}$$

2.1.5 Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel mengacu pada persentase kamar yang berhasil disewa dibandingkan dengan total kamar yang tersedia. Keberhasilan suatu tempat penginapan dalam menjual kamarnya dapat diukur dengan menghitung tingkat hunian kamar hotelnya (Pasaribu dan Woyanti, 2024). Ketersediaan fasilitas hotel yang lengkap dan memadai berpotensi menarik lebih banyak wisatawan untuk menetap lebih lama di suatu daerah wisata, yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan penerimaan dari pajak hotel serta memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.6 Jumlah Hotel

Menurut Siahaan dalam Sanjaya dan Wijaya (2020), hotel adalah salah satu bentuk usaha yang menyediakan jasa peristirahatan dengan berbagai fasilitas jasa di dalamnya. Dalam pengertian yang lebih luas, penyedia jasa akomodasi yang termasuk dalam kategori hotel mencakup berbagai bentuk usaha seperti motel, losmen, resort, pesanggrahan, rumah penginapan, serta tempat kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh unit. Dengan demikian, hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermalam, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pelayanan publik dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Salah satu bentuk usaha penyedia layanan bagi wisatawan adalah hotel, yang mana sektor perhotelan memiliki kontribusi penting dalam mendorong pembangunan daerah dan perlu dikembangkan secara optimal guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Tobing, 2021). Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik, klasifikasi hotel ditentukan menurut jenis usaha akomodasi, diantaranya :

1. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah usaha yang menawarkan penginapan jangka pendek yang memenuhi persyaratan hotel berbintang yang ditetapkan oleh lembaga khusus yang mengawasinya. Kategori berbintang berkisar dari hotel berbintang satu sampai berbintang lima. Contohnya : hotel bintang satu (Horison Resort Dieng), hotel bintang dua (HOM Hotel Kudus), hotel bintang tiga (Hotel Alila Solo), hotel bintang empat (Hotel Horison Semarang), hotel bintang lima (Amanjiwo Magelang).

2. Hotel Non-Bintang (Melati)

Hotel nonbintang merupakan jenis usaha akomodasi yang memanfaatkan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan tempat menginap, makanan, serta berbagai layanan dan fasilitas tambahan bagi wisatawan. Hotel ini belum memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai hotel berbintang, namun sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata setempat. Contohnya : losmen, wisma, guest house, motel.

3. Akomodasi Lainnya

Akomodasi lainnya adalah usaha yang menyediakan penginapan bagi wisatawan selain hotel. Akomodasi lainnya meliputi : homestay, villa, kampung wisata.

2.1.7 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai serangkaian aktivitas perjalanan yang memperoleh dukungan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta Pemerintah Daerah. Adapun kepariwisataan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sektor wisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul untuk memenuhi kebutuhan individu maupun negara serta melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan melakukan perjalanan yang tujuannya mendapat kenikmatan, kepuasan, berolahraga atau beristirahat, berziarah, dan lain-lain (Rahman, 2018).

2.1.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Wisatawan yaitu individu yang melakukan perjalanan ke suatu tempat atau lokasi tertentu dengan maksud untuk rekreasi, liburan, urusan bisnis, atau keperluan lainnya (Pasaribu dan Woyanti, 2024). Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik wisata yang kuat. Semakin lama wisatawan menginap di suatu lokasi, maka semakin besar pula pengeluaran mereka untuk kebutuhan seperti makanan, minuman, dan akomodasi. Hal ini akan berkontribusi positif terhadap pendaftaran sektor pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Austriana dalam Sabrina & Mudzhalifah, 2018).

Wisatawan memiliki beragam tujuan dalam melakukan perjalanan wisata, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa karakteristik, antara lain :

1. *Local Tourist* (Wisatawan Lokal)

Merupakan wisatawan yang melakukan aktivitas pariwisata di dalam batas wilayah negaranya sendiri, tanpa bepergian ke luar negeri.

2. *International Tourist* (Wisatawan Mancanegara)

Merupakan wisatawan yang datang dari negara lain untuk melakukan kegiatan wisata di negara tujuan.

3. *Holiday Tourist*

Merupakan wisatawan yang bepergian dengan tujuan utama untuk berlibur atau menikmati waktu luang.

4. *Business Tourist*

Merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan maksud menjalankan aktivitas usaha atau tugas pekerjaan.

5. *Common Interest Tourist*

Merupakan wisatawan yang bepergian dengan maksud tertentu seperti studi, penelitian, kunjungan keluarga, dan tujuan khusus lainnya.

6. *Individual Tourist*

Merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan secara mandiri tanpa tergabung dalam kelompok.

7. *Group Tourist*

Merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata bersama-sama dalam suatu kelompok atau rombongan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi atau kajian atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian terdahulu, skripsi, atau tugas akhir. Berikut ini merupakan sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis, yaitu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Dan Pajak Hotel & Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah. Pasaribu & Woyanti (2024)	Variabel Independen : 1. Jumlah Wisatawan 2. Jumlah Objek Wisata 3. Tingkat Hunian Kamar Hotel 4. Pajak Hotel & Restoran Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Y dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh X1, X2, X3, dan X4 secara bersamaan. Sementara X3 dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y, X1 memiliki pengaruh yang cukup besar namun negatif terhadap Y, sedangkan X2 memiliki pengaruh yang besar dan positif.
2.	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan PDRB Di Aceh	Variabel Independen : 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pendapatan asli daerah dan produk regional bruto dipengaruhi secara positif oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi tidak dipengaruhi secara

No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
	Aceh, dkk., (2022)	2. Tingkat Hunian Hotel Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah Dan PDRB Di Aceh	positif oleh tingkat hunian hotel.
3.	Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata dan Tingkat hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Karanganyar) Maharani, dkk. (2020)	Variabel Independen : 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Objek Wisata 3. Tingkat Hunian Hotel Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh banyaknya kunjungan wisatawan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh banyaknya objek wisata, dan pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh tingkat hunian hotel.
4.	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bukit Tinggi Aninda & Adriansyah (2022)	Variabel Independen : 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Tingkat Hunian Hotel Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah Di Kota	Berdasarkan hasil penelitian, meskipun X2 memberikan pengaruh besar namun bersifat negatif terhadap Y di Kota Bukit Tinggi, X1 justru menunjukkan dampak yang positif dan signifikan terhadap Y di kota tersebut.

No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
		Bukit Tinggi	
5.	Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 Dewi, dkk., (2020)	Variabel Independen : 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Objek Wisata 3. Jumlah Hotel 4. Jumlah Penduduk Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	Berdasarkan hasil kajian, PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan dan positif selama kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya wisatawan, banyaknya objek wisata, banyaknya hotel, dan banyaknya jumlah penduduk.
6.	Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun Tobing (2021)	Variabel Independen : 1. Jumlah Obyek Wisata 2. Tingkat Penghunian Kamar 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Variabel Dependen : 1. Pendapatan	Berdasarkan hasil riset, dinyatakan perubahan X1, baik peningkatan maupun penurunan selama periode penelitian, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Y Kabupaten Simalungun. Demikian pula, fluktuasi X3 selama periode tersebut juga tidak memberikan dampak nyata terhadap

No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
		Asli Daerah Kabupaten Simalungun	Y. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, dimana objek wisata di Kabupaten Simalungun belum mampu menghasilkan pendapatan daerah secara optimal.
7.	Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating pada Dinas Pariwisata Kota Palembang Sabrina & Mudzhalifah (2018)	Variabel Independen : 1. Jumlah Obyek Wisata 2. Jumlah Wisatawan 3. Tingkat Hunian Hotel Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah Variabel Moderating : 1. Penerimaan Sektor Pariwisata	Hasil riset menyatakan secara bersamaan, X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ketiga variabel tersebut juga tetap menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD ketika dimoderasi oleh variabel penerimaa sektor pariwisata. Secara khusus, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan pendapatansektor pariwisata sebagai variabel moderasi. Namun, Z tidak berhasil memoderasi pengaruh X2 terhadap Y, dan justru melemahkan pengaruh X3 terhadap Y. Secara parsial, Y dipengaruhi secara signifikan oleh X1 dan X3, tetapi tidak secara signifikan oleh X2. Dengan demikian, variabel moderasi pendapatan sektor pariwisata justru memperlemah hubungan antara jumlah objek

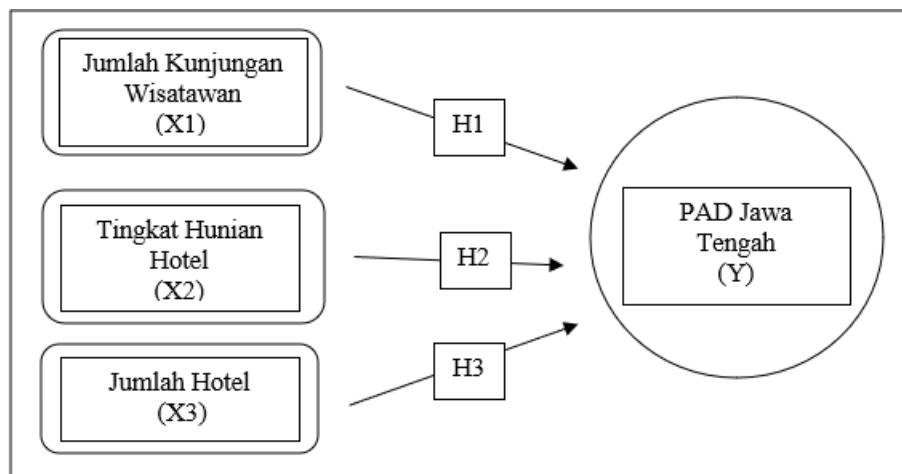
No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
			wisata, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap PAD.
8.	Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban Nurainina & Asmara (2022)	Variabel Independen : 1. Jumlah Wisatawan 2. Jumlah Hotel 3. Jumlah Objek Wisata Variabel Dependen : 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban	Berdasarkan hasil yang diperoleh secara parsial, PAD Kabupaten Tuban dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah hotel dan objek wisata selama tahun 2006–2020, namun jumlah kunjungan wisatawan tidak terlalu berpengaruh. Sementara itu, PAD Kabupaten Tuban dipengaruhi secara signifikan oleh X2, X3, dan X1 yang semuanya terjadi secara bersamaan.
9.	The Effect of Number of Visitors, Tourist Destinations, Hotel Room Tax and Accommodations on Original Local Government Revenue: Case Study West Sumatra Province, Indonesia Lusiana, dkk., (2021)	Variabel Independen : 1. Number of Visitors 2. Tourist Destinations 3. Hotel Room Tax and Accommodations Variabel Dependen : 1. Original Local Government Revenue	Hasil penelitian membuktikan jumlah wisatawan domestik berpengaruh positif dan signifikan atas PAD, jumlah wisatawan mancanegara juga berpengaruh positif dan signifikan atas PAD, PAD turut dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh jumlah objek wisata, Pajak restoran berkontribusi positif dan signifikan atas PAD, Pajak kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan

No	Judul, Penulis	Variabel	Hasil
			atas PAD selain itu, hubungan antara pajak kamar hotel dan PAD tampak dipengaruhi oleh variabel moderasi berupa jumlah akomodasi yang tersedia.
10.	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Restoran, Jumlah Hotel, dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Sektor Pariwisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 Asmisari, dkk., (2021)	Variabel Independen : 1. Jumlah Wisatawan 2. Jumlah Restoran 3. Jumlah Hotel 4. Jumlah Penduduk Variabel Dependen : PAD Sektor Pariwisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	Hasil temuan observasi ini, memperoleh kesimpulan bahwa X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata wilayah Jawa Tengah, X2 berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata wilayah Jawa Tengah, X3 tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata wilayah Jawa Tengah, dan X4 memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata wilayah Jawa Tengah, dan secara simultan, X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan atas PAD sektor pariwisata di wilayah Jawa Tengah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sumber : Dari beberapa penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada penjabaran hasil kajian dari berbagai penelitian terdahulu, maka dapat dirancang Gambar 2.1 yang menyajikan kerangka konseptual penelitian. Kerangka ini memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel independen, yakni jumlah kunjungan wisatawan (X1), tingkat hunian hotel (X2), dan jumlah hotel (X3), yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah (Y). Rancangan ini digunakan untuk menggambarkan arah dan bentuk hubungan antar variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah, 2025

Keterangan :

—→ : Pengaruh X pada Y secara parsial (sendiri)

X1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan (JKW)

X2 : Tingkat Hunian Hotel (THH)

X3 : Jumlah Hotel (JH)

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam suatu penelitian, yang didasarkan pada suatu teori serta perlu dibuktikan kebenarannya secara empiris (Sugiyono, 2019). Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, telaah literatur, dan tujuan penelitian, penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu unsur penting yang turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan PAD di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan permintaan terhadap fasilitas seperti penginapan, restoran, dan atraksi wisata juga akan meningkat. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan berdampak pada semakin banyaknya bisnis yang berfokus pada sektor wisata, seperti biro travel, penginapan, restoran, dan lain-lain. Pada akhirnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung bisnis tersebut akan meningkatkan PAD (Pasaribu dan Woyanti, 2024). Dengan pajak hotel, pajak restoran, serta biaya retribusi untuk akses ke objek wisata, Jawa Tengah mampu memanfaatkan kunjungan wisatawan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Destinasi wisata unggulan Provinsi Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, Lawang Sewu, dan Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu faktor utama dari

sektor pariwisata yang menjadi penggerak PAD. Baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tertarik pada tempat wisata ini. Hal ini akan berdampak pada ekonomi lokal melalui penerimaan pajak dan juga retribusi yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

Menurut teori pembangunan ekonomi daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah termasuk sektor pariwisata sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Dengan banyaknya destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menarik jumlah wisatawan lebih besar untuk datang mengunjungi berbagai destinasi wisata. Teori pembangunan ekonomi daerah berperan dalam penentuan cara memanfaatkan sumber daya alam sebagai destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan. Maka dalam hal ini, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berbanding lurus dengan pengeluaran yang dilakukan oleh para wisatawan. Dimana pengeluaran ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan penelitian Anggrismono dan Aviva (2023) mengungkapkan sesungguhnya jumlah wisatawan memberikan kontribusi positif signifikan pada PAD di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Marie dan Widodo (2020) juga mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD Sub Sektor Pariwisata di DIY tahun 2007-2018. Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Rahayu (2020) bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh

terhadap PAD. Namun, berbeda dengan kajian oleh Erliyaton, dkk. (2023) mengungkapkan sesungguhnya jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumenep. Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Rieshe (2020) juga mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sikka tahun 2016-2018. Serta penelitian Asmynendar, dkk. (2021) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa jumlah wisatawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Batu. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dapat diformulasikan berikut ini:

H1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD

2.4.2 Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tingkat hunian hotel adalah salah satu indikator dalam sektor pariwisata yang berdampak langsung terhadap PAD Jawa Tengah. Peningkatan tingkat hunian hotel berjalan seiring dengan naiknya penerimaan pajak hotel, salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang kaya akan destinasi wisata, dengan itu wisatawan yang datang membutuhkan akomodasi untuk tempat tinggal, sehingga permintaan terhadap fasilitas penginapan termasuk hotel akan meningkat. Tingkat hunian hotel yang tinggi meningkatkan penerimaan pajak hotel, kondisi ini mendorong pelaku usaha hotel untuk meningkatkan layanan dan fasilitas hotel untuk menarik lebih banyak wisatawan. Wisatawan akan tinggal

lebih lama apabila hotel memiliki fasilitas yang memadai, tentunya dengan hal ini berdampak pada semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh wisatawan dengan demikian, penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat (Asmynendar et al., 2021).

Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, sektor pariwisata termasuk industri perhotelan diakui menjadi salah satu penggerak penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam peningkatan aktivitas pariwisata nantinya diharapkan dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan penerimaan pajak daerah. Tingkat hunian hotel menjadi indikator penting dalam sektor pariwisata yang mencerminkan terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Meningkatnya tingkat hunian hotel mencerminkan tingginya permintaan terhadap layanan akomodasi. Aktivitas ini akan berdampak langsung terhadap penerimaan pendapatan daerah melalui pajak hotel maupun dari sektor pendukung seperti restoran, transportasi, dan perdagangan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata khususnya industri perhotelan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini selaras dengan penelitian Sabrina dan Mudzhalifah (2018) bahwa Tingkat penggunaan kamar hotel memberikan dampak secara simultan yang signifikan pada PAD. Penelitian Pratama dan Harahap (2023) mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Barat. Hal sama juga diungkapkan oleh hasil penelitian Marie dan

Widodo (2020) bahwa tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PAD sub sektor pariwisata di DIY tahun 2007-2018. Berbeda dengan temuan Aceh, dkk. (2022) menunjukkan tingkat penggunaan kamar hotel tidak memiliki pengaruh positif pada PAD. Penelitian Katiandagho, dkk. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Manado. Hal yang sama diungkapkan oleh penelitian oleh Anida dan Ardiansyah (2022) bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dapat diformulasikan berikut ini:

H2 : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap PAD

2.4.3 Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Keberadaan hotel dalam suatu wilayah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi jumlah hotel yang ada, maka semakin besar pula potensi daerah tersebut untuk memperoleh PAD melalui penerimaan pajak hotel. Dengan bertambahnya hotel, kapasitas untuk menampung wisatawan juga meningkat, yang memungkinkan berkembangnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan pariwisata.

Dengan banyaknya destinasi wisata yang dimiliki kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kota Semarang, Solo, Magelang, Tegal, Pekalongan, Surakarta menunjukkan bahwa keberadaan hotel mempengaruhi PAD. Jumlah hotel juga mendorong pengembangan pada restoran, pusat perbelanjaan, dan

transportasi. Sektor-sektor tersebut juga akan berkontribusi terhadap PAD melalui pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Teori pembangunan ekonomi daerah dalam hal ini menekankan pada pentingnya pengembangan sektor-sektor produktif yang berbasis potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara inklusif dan berkelanjutan. Jumlah hotel dalam suatu daerah dapat menunjukkan kapasitas infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata dan juga menunjukkan kesiapan daerah dalam menyerap arus wisatawan dan pelaku ekonomi lainnya. Peningkatan jumlah hotel menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap fasilitas akomodasi yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang pariwisata dan bisnis. Keberadaan hotel juga berperan sebagai efek berganda (*multiplier effect*) dimana pembangunan hotel tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung namun juga berpengaruh terhadap sektor lain seperti restoran, transportasi, dan perdagangan. Tentunya dengan ini akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak daerah. Maka dari itu, diharapkan pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung agar peningkatan jumlah hotel dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sejalan dengan hasil kajian Nurainina dan Asmara (2022) yang menunjukkan bahwasannya secara parsial jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Tuban pada tahun 2006-2020. Penelitian oleh Sanjaya dan Wijaya (2020) mengungkapkan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Barat. Hal serupa juga

diungkapkan penelitian Alfian (2018) bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Asmisari, dkk. (2021) yang mengungkapkan sesungguhnya jumlah hotel tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD dari sektor pariwisata di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal serupa juga diungkapkan oleh penelitian Pratama dan Harahap (2023) bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Barat.

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dapat diformulasikan berikut ini:

H3 : Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap PAD